

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MELINDUNGI WARGA
NEGARA INDONESIA (WNI) SAAT MELETUSNYA KONFLIK SYI'AH
HOUSHI DI YAMAN PADA TAHUN 2011- 2014**

A. Alasan Pemilihan Judul Skripsi

Fenomena *Arab Spring* pada akhir 2010 telah menyebabkan banyak perubahan pada peta geopolitik mayoritas Negara Arab. Berawal dari ketidakpuasan warga Tunisia akan pemerintah mereka pada Desember 2010, lalu gelombang protes dari ketidakpuasan yang awalnya muncul atau pecah di Tunisia itu meluas ke berbagai Negara Arab lainnya. Di Yaman sendiri sebenarnya konflik bersenjata telah mulai pada era Presiden Ali Abdullah Saleh. Protes besar-besaran yang terjadi di Negara dengan ibukota Sana'a ini menelan hingga 2000 korban jiwa. Demonstrasi yang terjadi ini berujung hingga lengsernya sang Presiden dari kursi kepemimpinannya.¹

Setelah mundurnya Presiden Ali Abdullah Saleh, kursi kepemimpinan Yaman kemudian dipegang oleh Abed Rabbo Mansour Al Hadi. Penunjukan Mansour Al Hadi ini langsung mendapat tanggapan keras dari kelompok Al Qaeda semenanjung Arab (AQAP) yang ikut melibatkan diri karena menganggap Mansour Hadi sebagai antek Amerika. Penentangan Al Qaeda ini sendiri merupakan konsistensi sikap terhadap penolakan posisi Amerika yang sering dianggap sebagai dalang yang ingin mengekspansi seluruh wilayah Timur Tengah untuk menanamkan kepentingannya.² Meski tonggak kepemimpinan telah berganti, suasana konflik di Yaman tidak semata-

¹ <http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>, diakses pada tanggal 13/09/2015

² Agastya M. ABM. *Arab Spring*. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), Hal.141

mata langsung membaik, perlawanan dari internal Negara oleh kelompok Syi'ah Houthi muncul karena merasa diperlakukan secara berbeda oleh Pemerintah yang mayoritas dipegang kaum Sunni. Meski sebenarnya konflik ini telah terjadi jauh sebelum fenomena *Arab Spring*, namun kelompok Houthi mencoba memanfaatkan peralihan kepemimpinan guna mendapat kekuasaan.

Semakin memanasnya eskalasi konflik di Yaman ini berujung hingga berhasilnya kelompok Houthi menguasai ibu Kota Sana'a yang merupakan distrik pusat pemerintahan. Setelah Presiden Abdullah Saleh kehilangan legitimasi kekuasaannya, inisiatif politis yang diambilnya adalah meminta bantuan internasional ke mitranya yakni Saudi Arabia, Negara-negara teluk dan Amerika. Melalui dukungan sekutunya tersebut, kota Sana'a dalam sekejap berubah seperti target bom bardir Arab Saudi. Tindakan Raja Salman selaku Penguasa tertinggi di Saudi Arabia ini bukanlah tanpa alasan, keputusannya untuk ikut serta memerangi Kaum Syi'ah Houthi ini karena adanya anggapan bahwa mereka memiliki potensi membawa ancaman bagi kestabilan kawasan Teluk.³

Situasi dan kondisi keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) di Yaman semakin mengkhawatirkan. Sebab, koalisi Negara Arab pimpinan Arab Saudi semakin gencar dalam melakukan serangan terhadap basis-basis kelompok Houthi. Sebagai salah satu negara dengan banyaknya jumlah warga negara yang berada di wilayah Yaman, Indonesia seperti menghadapi suatu tantangan besar untuk mengevakuasi warganya secepat mungkin. Selain faktor letak geografis yang cukup

³ <http://international.sindonews.com/read/982503/44/ini-alasan-raja-salman-gempur-houthi-di-yaman-1427545152> diakses pada 15-09-2015

jauh serta keterbatasan fasilitas pendukung proses evakuasi, pemerintah dituntut mampu menciptakan inisiatif guna tetap melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) mengingat bahwa yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri saat ini.⁴

Proses evakuasi yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia tidaklah mudah mengingat terbatasnya jalur dan alat transportasi terkait yang bisa digunakan akibat agresi militer sekutu Arab ke kota Sana'a yang masih berlangsung. Selain itu, suasana yang kacau dan tidak terkendali menyebabkan sulitnya koordinasi efektif bisa dilakukan di lapangan.

Berdasarkan pemaparan diatas serta pemahaman lebih dalam melalui literatur yang ada, maka penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana upaya Pemerintah dalam melindungi keselamatan WNI di Yaman setelah meletusnya konflik antara Pemerintah setempat dengan kelompok Syi'ah Houthi pada tahun 2011. Penyusunan skripsi ini diharapkan mampu memberi sumbangan pengetahuan yang mendalam terhadap Pemerintah Indonesia maupun segenap institusi terkait tentang sikap cepat dan tanggap yang harus dilakukan sebagai bentuk penanganan terbaik untuk melindungi WNI di luar negeri, khususnya disaat keberadaan WNI di luar negeri terancam akibat konflik di wilayah tersebut.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis bermaksud untuk:

⁴ <http://news.okezone.com/read/2015/06/13/18/1164915/menlu-retno-tegaskan-kebijakan-luar-negeri-ri> diakses pada 16/09/2015

1. Mendeskripsikan mengenai awal mula dinamika konflik yang terjadi di Yaman semenjak tahun 2011 serta menggambarkan kondisi WNI yang berada ditengah-tengah konflik tersebut.
2. Mengetahui tentang bagaimana langkah atau kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI saat meletusnya konflik Syiah Houthi yang ada di Yaman.
3. Menjelaskan bagaimana langkah atau kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI saat meletusnya konflik Syiah Houthi di Yaman dalam tinjauan diplomasi serta Politik Luar Negeri Indonesia.

C. Latar Belakang

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada diantara dua benua besar yakni Asia dan Australia serta diapit dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau.⁵ pada tahun 2010, jumlah populasi penduduk di Indonesia mencapai 237 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 207 juta jiwa.⁶

Selain memiliki populasi yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diakses pada 13/09/2015

⁶ <http://www.bps.go.id/brs/view/id/1172> diakses pada 13/09/2015

dunia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden yang dipilih secara langsung.

Secara kiproah politik internasionalnya, Indonesia juga merupakan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke 60 sejak 28 September 1950, meski Indonesia pernah mencabut keanggotaannya pada 7 Januari 1965 dan kemudian bergabung kembali pada 28 September 1966. Selain itu Indonesia juga tercatat sebagai anggota dari ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20 serta OECD. Semenjak bargantinya rezim kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, dinamika sikap politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat berbeda. Sikap Presiden Soekarno yang Anti-imperialisme, antipati terhadap kekuatan Barat, dan bersitegang dengan Malaysia cenderung berujung terhadap pembatasan terbentuknya kerjasama Politik, Sosial maupun Ekonomi dengan beberapa Negara Internasional. Namun semenjak peralihan Orde Lama tersebut ke pemerintahan rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, Indonesia mulai membentuk haluan hubungan luar negeri yang didasarkan pada kerjasama ekonomi dan politik dengan Negara-negara tetangga, Negara-negara Timur Tengah serta beberapa Negara-negara Barat untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional.⁷

Partisipasi politik internasional Indonesia sangatlah gemilang dalam kancan internasional, Indonesia sebagai negara yang belum lama merdeka, tercatat telah berperan penting dalam lahirnya beberapa organisasi internasional. Peran penting itu terwujud melalui lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB) serta Organisasi Kelompok

⁷ "Indonesia – Foreign Policy". *U.S. Library of Congress*. U.S. Library of Congress. Diakses tanggal 13/09/2015.

Islam yang sekarang menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dimana Indonesia merupakan Negara penggagas serta pendiri dari organisasi tersebut. Dengan jumlah pemeluk Islam yang besar di negaranya, Indonesia memiliki kedekatan secara *Religio-Cultural* dengan Negara-negara Timur Tengah. Hal ini bisa kita ketahui dari adanya pengakuan pertama kedaulatan Indonesia dari Mesir kemudian diikuti oleh Negara-negara Timur Tengah lainnya pasca lepas dari kolonialisme Belanda. Pernah terlibat kerjasama ekonomi sebagai negara pengeksport minyak mentah dalam OPEC hingga 2008 yang mana dominasi anggotanya merupakan merupakan Negara Timur Tengah semakin menambah rentetan kedekatan antara Indonesia dengan Negara-negara Arab tersebut.

Dalam hubungannya dengan Yaman, jika kita meruntut sejarah perkembangan Indonesia lebih jauh, sebenarnya Indonesia dan Yaman telah memiliki keterkaitan lebih lama dalam hal persebaran peradaban Islam dari pada hubungan kerjasama apapun. Yaman dikenal sebagai tempat menuntut ilmu agama, tepatnya di kota Hadramaut. Dari kota itu, dakwah Islam disiarkan ke berbagai Negara, tak terkecuali Indonesia. Sebut saja, misalnya delapan dari Sembilan ulama yang terkenal dengan sebutan *Wali Songo*, ternyata datang dari Yaman. Bahkan pengaruh penyebaran Islam ini telah meluas ke bidang pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Berdirinya Lembaga Pendidikan Al-Khairaat di kawasan Indonesia Timur milik Habib Jufri yang merupakan Ulama terkemuka Yaman ini pun bisa dilihat sebagai bukti kekinian.⁸

⁸ Agastya M. ABM, *Op. Cit.* Hal.136

Yaman merupakan Negara yang berkonflik dan bisa di bilang sebagai negara miskin jika dibandingkan dengan Negara Arab disekitarnya. Sebagian wilayah di Yaman masih merupakan wilayah terbelakang secara perkembangan. Negara ini merupakan wilayah berserikat yang berbentuk Republik. Secara geologis, Yaman merupakan negara Jazirah Arab di Asia Barat, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah Selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah Barat, Oman di sebelah Timur dan Arab Saudi di sebelah Utara.⁹

Konflik berkepanjangan di Yaman sendiri sebenarnya merupakan imbas dari lemahnya pemerintah pusat Yaman dalam menguasai kota Sana'a setelah penguasaan dari kelompok Syi'ah Houthi serta gerakan separatis di Yaman Selatan. Berbagai pihak mengkhawatirkan situasi keamanan yang tidak stabil dan tidak kondusif di Yaman, akan dimanfaatkan oleh kelompok militant Al-Qaeda. Memang konflik Yaman dibayang-bayangi meluasnya area perseteruan abadi Saudi Arabia-Iran dan Sunni-Syi'ah. Meski belum ada bukti-bukti kuat, asumsi umum agaknya sepakat terhadap adanya kesadaran akan peran Iran yang mendukung gerakan Syi'ah Houthi Yaman.¹⁰ Meski banyak ulama-ulama Sunni dan mayoritas negara yang menganut madzhab Sunni melayangkan kecaman terhadap sikap Iran, namun itu semua rasanya tidak mampu menyurutkan niat Iran untuk terus membantu saudara Syi'ahnya di Yaman.

Banyaknya jumlah Warga Negara Indonesia di Yaman Berdasarkan data terakhir yang sempat teraudit Kemenlu, tercatat bahwa ada sekitar 4.159 WNI,

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Yaman> diunduh pada 13/09/2015

¹⁰ <http://www.suara-Islam.com/news/berita/internasional/329eskalasikonflik-sipil-yaman-mencemaskan> . diunduh pada 13/09/2015

dengan perincian 2.686 mahasiswa serta 1.488 pekerja. Meski Yaman sejatinya tidak sekaya Negara-negara arab lainnya, namun sebagai negara yang memiliki potensi kekayaan mineral cukup besar di dunia ini pun mampu menggerakkan minat beberapa warga asing untuk datang dan mencari pekerjaan disana, salah satunya WNI.

Menyikapi krisis yang terjadi di Yaman tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan penyelamatan atau evakuasi sesegera mungkin. Dalam hal ini, melindungi WNI haruslah menjadi prioritas utama pemerintah yang dilakukan. Keterbatasan jumlah armada udara, pertimbangan keamanan jalur udara serta panjangnya proses administratif perizinan (*Flight-Clearance*) maskapai Indonesia ke bandara Yaman tentu menjadi penghambat besar bagi proses evakuasi WNI disana. Gempuran pasukan pesawat koalisi Arab ke pusat kelompok Syi'ah Houthi memang telah menyebabkan sulitnya proses evakuasi menggunakan jalur udara maupun laut. Proses evakuasi saat ini memang berfokus utama untuk mengeluarkan WNI sesegera mungkin dari wilayah konflik di Yaman. Upaya terbaik pemerintah adalah dengan berkoordinasi dengan seluruh kantor kedutaan (KBRI) atau segenap konsulat jenderal (KJRI) di beberapa Negara sekitar Yaman untuk membantu mengevakuasi WNI melalui akses yang tersedia.

Penggunaan jalur darat dengan bus atau mobil angkut massal memang merupakan alternatif pengevakuasian, namun bukan berarti melalui proses ini pun tidak menghadapi kendala. Akibat eskalasi konflik yang semakin meruncing, tak hanya rentetan bom pasukan koalisi Arab yang menjadi kecemasan, namun blokade pasukan Syi'ah Houthi di berbagai perbatasan kota pun menjadi penghambat

kelancaran evakuasi WNI.¹¹ Rombongan WNI yang dipimpin satuan petugas evakuasi Kementerian Luar Negeri rencananya akan di bawa menuju negara tetangga yang dekat dengan Yaman, yakni Saudi Arabia, Oman dan Ethiopia.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah berupaya serius dan maksimal untuk menjalankan kewajibannya guna tetap melindungi WNI di luar negeri. Meski evakuasi tersebut tidak langsung memulangkan ke Republik Indonesia, namun upaya pemerintah tersebut tetaplah memprioritaskan keamanan serta keselamatan WNI, mengingat banyaknya kendala yang menjadi halangan serta lebih besarnya jumlah WNI di Yaman jika di bandingkan dengan warga negara lain. Tidak bisa dipungkiri jika semua itu merupakan pengaruh dari telah terjalinnya banyak hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia-Yaman. kerjasama tersebut hampir terjalin ke berbagai bidang seperti: Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya bahkan Politik. Dari semua kerjasama itu, yang paling banyak memberikan kontribusi persebaran jumlah WNI di Yaman adalah kelompok Pelajar atau Mahasiswa serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Yaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan landasan teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah terkait “Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia melindungi WNI di Yaman setelah meletusnya konflik antara kelompok Syi’ah Houthi dengan Pemerintah Yaman?”

¹¹ http://joss.today/read/22289-dunia-satgas_kemanusiaan_berhasil_keluarkan_1500_wni_dari_yaman.html diunduh pada 13-09-2015

E. Landasan Teoritis

Teori adalah suatu pandangan atau konsepsi tentang apa yang terjadi. Teori berupaya untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.¹²

Dalam kasus seperti yang terjadi di Yaman, pada dasarnya akan memunculkan pertanyaan, bagaimana upaya terbaik Pemerintah Indonesia melindungi warga negaranya yang berada di wilayah yang sedang mengalami konflik? Serta apakah upaya memberi perlindungan WNI tersebut memiliki korelasi terhadap posisi Diplomasi maupun Politik Luar Negeri Indonesia?.

Melihat dari pertanyaan-pertanyaan diatas, kemudian memunculkan suatu teori untuk menganalisa pokok permasalahan sehingga tidak terjadi kerancuan dalam memberi jawaban, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan *Konsep Negara*, dan *Teori Peranan* agar mampu mendukung penulisan karya tulis ini.

1. Konsep Negara

Dalam buku karangan Miriam Budiardjo, konsep negara menurut Roger F. Soltau merupakan alat (*Agency*) atau wewenang (*Authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat.¹³

¹² Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, edisi revisi. (Jakarta: LP3S, 1990). Hal.185.

¹³ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2008). Hal. 39.

Selain itu, negara juga memiliki fungsi yang mengikat terhadap posisinya, dimana posisi itu perlu ditetapkan sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara. Fungsi tersebut antara lain:¹⁴

1. Fungsi Legislatif: Membuat Undang-Undang.
2. Fungsi Eksekutif: Melaksanakan Undang-Undang, termasuk mengadili pelanggar Undang-Undang.
3. Fungsi Yudikatif: Mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).

Sebagaimana yang terjelaskan pada fungsi eksekutif, yakni Pemerintah Indonesia harus melaksanakan undang-undang. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia haruslah memberikan perlindungan untuk WNI yang terjebak dalam konflik Yaman melalui perwakilan Indonesia yang ada di Yaman maupun di beberapa negara Timur Tengah lainnya, mengingat mereka merupakan Warga Negara Indonesia yang telah disahkan statusnya secara undang-undang.

Dalam UUD 1945 Bab X Pasal 26 angka 1 tentang Warga Negara dan Penduduk, telah disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹⁵

Kemudian pada UUD 1945 Bab XA Pasal 28G angka 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia,¹⁶ pada angka 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang

¹⁴ *Ibid* Hal.159

¹⁵ Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 26 angka 1 Tentang Warga Negara Dan Penduduk

¹⁶ UUD 1945 Bab XA Pasal 28G angka 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian pada angka 2; setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Selain itu, Pemerintah Indonesia haruslah mampu memaksimalkan diplomasi serta peran luar negerinya terhadap negara Arab lain di sekitar Yaman untuk mendukung langkah penyediaan program perlindungan WNI disana. Kendala-kendala yang akan dihadapi pemerintah memang bukanlah hal yang mudah untuk di hadapi mengingat banyaknya persebaran WNI itu tidak hanya berstatus sebagai pekerja (TKI), tetapi banyak juga yang belajar atau bahkan sedang berwisata di Yaman.

Pemerintah Indonesia dituntut harus mampu menjalankan fungsinya dalam melindungi warga negara sebagaimana tertulis dalam amanat perundang-undangan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Upaya melindungi WNI dari lokasi-lokasi terjadinya pemberontakan tersebut haruslah mampu membawa mereka menuju tempat lain yang lebih aman serta memadai untuk di beri pertolongan atau untuk di tindak lanjuti kondisinya guna kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia haruslah mampu mempertimbangkan setiap kesempatan yang ada untuk memulangkan WNI ke tanah air secara langsung sekaligus ataupun menempatkan mereka di kantor perwakilan (KBRI atau KJRI) yang ada disana dalam tempo waktu tertentu.

2. Teori Peranan

Teori peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh sebagian pihak dalam posisi sosialnya, dimana posisi sosial ini pun mampu kita terjemahkan sebagai eksistensi negara. Suatu Negara dewasa ini pasti melakukan kegiatan yang menciptakan hubungan dengan Negara lain guna memenuhi kebutuhan nasionalnya. Sebagai contoh kerjasama ekonomi berupa ekspor-impor, investasi asing dan lain-lain. Kerjasama militer berupa pelatihan pasukan bersama, kerjasama pemberantasan terorisme internasional, kerjasama penguatan alutsista militer dan lain-lain. Kerjasama pendidikan seperti adanya pertukaran pelajar, pemberian beasiswa ke luar negeri dan lain-lain. Hubungan tersebut tentu akan semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu serta munculnya bentuk kepentingan lain yang ingin diperoleh. Kemudian posisi sosial masing-masing Negara tersebut akan mengkrystal sebagai suatu kegiatan Politik Hubungan Internasional.

Peranan dapat diartikan juga sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, memberi arah dan mendukung fungsi dalam suatu organisasi.¹⁷ Teori peranan memberikan kerangka konseptual dalam studi perilaku organisasi. peranan merupakan aspek dinamis, apabila telah melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kewenangan serta kedudukannya, maka variable tersebut telah

¹⁷ T.Coster and Antony Rosenberg. *An Introduction To International Policies*. (New Jersey: Prentice Hall, 1976). Hal. 232

menjalankan peranannya.¹⁸ Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan oleh suatu pihak.

Selanjutnya dari teori peranan ini memunculkan istilah peran. Pengertian dari peran ini sendiri adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam suatu lingkungan atau masyarakat.¹⁹ Peran berarti juga perilaku yang diharapkan dari seseorang atau organisasi yang mempunyai kewenangan dan mempunyai status.²⁰

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Dalam teori ini ada satu jenis peran (Role) yang bisa dilakukan bisa dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai peranan untuk menjalankan tujuan atau kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang berada di tengah konflik Yaman, yaitu *Role Perception*, hal ini merupakan peranan yang dilakukan untuk membentuk suatu persepsi orang lain di luar subjek. Persepsi diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dari subjek sebagai pelaku peran.

Pemerintah Indonesia sebagai penguasa tertinggi negara diharapkan mampu melindungi serta mengayomi kehidupan warga negaranya. Ketika Pemerintah Indonesia berhasil menjalankan perannya dalam memberikan hak-hak warga negara, tentu akan menghasilkan persepsi yang diinginkan dari warga negaranya. Begitulah setidaknya yang harus mampu dilakukan Pemerintah Indonesia ketika mengetahui

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2001). Hal.268

¹⁹ Banyu Perwira, Anak Agung, Yani DR. *Dkk. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: PT.REMAJA ROSDAKARYA). Hal.29

²⁰ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Terjemahan Ram Aminudin dan Tirta Sobari. *Sosiologi*. (Jakarta: ERLANGGA, 1987) Hal. 132

adanya WNI yang terjebak di Yaman ketika mengalami konflik nasional. Pemerintah harus tetap mampu melindungi keberadaan mereka disana meskipun keberadaan mereka berada diluar negeri, namun status mereka tetaplah warga negara yang telah disahkan sebagai Warga Negara Indonesia.²¹

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik hipotesa terkait kebijakan yang pemerintah Indonesia lakukan untuk melindungi WNI yang terjebak dalam konflik yang terjadi di Yaman, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan evakuasi kepada segenap WNI di Yaman melalui pengiriman tim satuan tugas khusus (Satgas) untuk merancang mekanisme evakuasi.
2. Tim Satgas melakukan penjemputan kepada segenap WNI di Yaman untuk di bawa ke pos-pos aman (*Safe House*), kemudian di evakuasi melalui jalur yang tersedia ke wilayah sekitar yang aman dan terdapat kantor Perwakilan Luar Negeri Indonesia (KBRI atau KJRI) atau langsung diterbangkan ke Indonesia dari titik kumpul (*Check Point*) yang telah di tentukan.
3. Kementerian Luar Negeri Indonesia menerapkan situasi siaga 1 pada segenap kantor Perwakilan Luar Negeri Indonesia (KBRI atau KJRI) di Yaman maupun sekitarnya untuk meningkatkan pengawasan WNI serta persiapan pelayanan evakuasi maupun perlindungan WNI yang belum dievakuasi.

²¹ Undang-Undang Pasal 26 no.1 tahun 1945 Tentang Warga Negara Dan Penduduk

G. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Baik dalam bentuk buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah-majalah, internet serta berbagai media lain. Kemudian sumber-sumber relevan lain yang akan menjadikan penelitian ini menjadi penelitian ilmiah.

Sebagai literatur atau bahan hukum primer, penulis menggunakan Kitab Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal yang terkait dan Rumusan Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang no.31 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

H. Jangkauan Penelitian

Guna menghindari perluasan dalam fokus pembahasan dan untuk minimalis inkonsistensi pokok permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berinisiatif untuk membatasi pokok-pokok pembahasan atau ruang lingkup pembahasan skripsi ini dengan dimensi waktu dan peranan Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI pasca meletusnya konflik Syi'ah Houthi di Yaman.

Penulis memutuskan untuk membatasi dimensi waktu terkait muncul dan berjalannya konflik tersebut mulai tahun 2011 hingga 2014. Pada kurun waktu tersebut merupakan masa dimana fenomena *Arab Spring* mulai menerpa Yaman.

Demonstrasi besar dilakukan rakyat Yaman demi revolusi menuntut pemberhentian rezim pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh yang gagal membawa kesejahteraan rakyat.²² Selain itu, konflik yang telah terjadi itu semakin meruncing dengan melibatkan kelompok Syi'ah Al Houthi yang bersitegang dengan Pemerintahan baru Yaman, dibawah Presiden Mansour Hadi. Sang Presiden kemudian melibatkan intervensi militer asing dari sekutu utamanya, yakni Saudi Arabia dan Amerika Serikat untuk ikut memerangi kelompok Houthi.²³

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, penggambaran keseluruhan dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu berisi tentang pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah kerangka teori, hipotesis metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis akan membahas tentang bagaimana dinamika sistem politik luar negeri Indonesia. Mengurai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Yaman. Kemudian menjelaskan landasan hukum perlindungan WNI maupun TKI yang ada di luar negeri, serta Hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan masyarakat asing di suatu negara.

²² Erikson Kristian S. *Kepentingan Amerika Serikat di Yaman Dalam Rangka Menggagalkan Revolusi Yaman oleh Al-Houthi Yang Didukung Iran Pada Tahun 2011*. (Jurnal Unri, 2010). Hal.2

²³ <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/10/06/nvr8f366-raja-saudi-dan-presiden-yaman-bicarakan-konflik> diakses pada 13/9/2015

Bab III, pada bagian ini akan memaparkan tentang deskripsi politik nasional Yaman dan dinamika konflik Syi'ah Houthi di Yaman semenjak kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh hingga berpindahna tonggak kekuasaan pada Presiden Abed Rabbo Mansour Al Hadi. Dalam Bab ini juga akan menjelaskan tentang kondisi dan persebarannya WNI serta merinci tentang kasus-kasus yang menimpa WNI atau TKI ditengah meletusnya krisis di Yaman.

Bab IV, dalam Bab ini penulis akan membahas sikap Pemerintah Indonesia terhadap revolusi di Yaman, kebijakan luar negeri Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI di tengah berlangsungnya konflik Syi'ah Houthi di Yaman. Memaparkan tentang mekanisme evakuasi serta pengkoordinasian lembaga perwakilan RI di Timur Tengah. Menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI di Yaman. Kemudian menjelaskan tentang pencapaian keberhasilan pemerintah dalam mengevakuasi WNI maupun TKI dari Yaman.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang merangkum penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan, dimana pada bab terakhir ini akan dibahas hal-hal berupa kesimpulan dari awal hingga akhir.